



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2016 NOMOR 20**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 20 TAHUN 2016**

TENTANG

**TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK LAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pengembangan perekonomian rakyat serta memberi pelayanan jasa perbankan kepada usaha menengah, kecil dan mikro secara optimal dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, maka perlu tambahan penyertaan modal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Way Kanan pada Perseroan Terbatas Bank Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan.....

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada PT. Bank Lampung (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 153);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WAY KANAN PADA PERSEROAN TERBATAS BANK LAMPUNG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan;
2. Bupati adalah Bupati Way Kanan;

3. Modal.....

3. Modal daerah adalah penyertaan modal daerah Kabupaten Way Kanan yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan;

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Pembangunan Daerah Bank Lampung adalah :

1. Menjadi Pemilik saham yang termasuk kelompok penentu arah kebijakan PT. Pembangunan Daerah Bank Lampung;
2. Mendorong laju pertumbuhan ekonomi;
3. Memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB III SUMBER DANA

Pasal 3

- (1) Tambahan Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Way Kanan kepada PT. Pembangunan Daerah Bank Lampung berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2016.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dicantumkan dalam sertifikat saham.

BAB IV BESARAN

Pasal 4

- (1) Tambahan Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Way Kanan yang telah disetor untuk Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp.500.000.000,00 (*Lima ratus juta rupiah*).
- (2) Penyertaan modal pemerintah Kabupaten Way Kanan ke PT. Pembangunan Daerah Bank Lampung Tahun Anggaran selanjutnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

(3) Besarnya.....

- (3) Besarnya Penyertaan Modal Tahun berikutnya disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Way Kanan.

BAB V DIVIDEN ATAS PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

Dividen yang diperoleh atas penyertaan modal kepada PT. Pembangunan Daerah Bank Lampung secara langsung merupakan komponen pendapatan daerah.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berhak menerima pembagian dividen berdasarkan persentase kepemilikan modal pada PT. Pembangunan Daerah Bank Lampung setiap tahunnya.
- (2) Pembagian dividen ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, Pemerintah Daerah mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- (3) Dividen yang menjadi Hak Pemerintah Kabupaten Way Kanan selama satu tahun disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 1 November 2016

Disalin sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

INDRA ZAKARIYA R, SH.,MH

Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19750926 200012 1 003

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 1 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

Dto,

BUSTAM HADORI

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2016 NOMOR 20

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2016 NOMOR 20**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 20 TAHUN 2016**

TENTANG

**TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK LAMPUNG**



**DIKELUARKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SETDAKAB. WAY KANAN
TAHUN 2016**